

**ABSTRAK****STRATEGI PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DALAM  
PENANGANAN MASALAH PELINTAS BATAS INDONESIA-TIMOR LESTE**

Remigius Seran

*Salah satu perbatasan yang memiliki isu tata kelola yang pelik adalah perbatasan antara Indonesia dan Timor Leste. Urgensi untuk menata Perbatasan Antara Indonesia dan Timor Leste serta para pelintas batas didasari oleh alasan historis yang jauh lebih kompleks dibandingkan dengan penataan perbatasan Indonesia dengan Negara lain. kebijakan tata kelola perbatasan antara Indonesia dan Timor Leste dicirikan oleh: kebijakan tata kelola perbatasan mengindikasikan keinginan untuk menerapkan pendekatan terintegrasi, praktek tata kelola cenderung terfragmentasi di mana dua pendekatan sangat dominan yakni pendekatan keamanan dan pendekatan kesejahteraan sosial ekonomi. Kebijakan tata kelola perbatasan yang mengabaikan variable identitas kultural justru menghasilkan respons sebaliknya yakni penggunaan identitas kultural untuk menantang konsepsi dan kebijakan dominan versi negara dalam tata kelola perbatasan. Fenomena “jalan tikus” dan jaringan interaksi lintas batas lain yang disebut illegal oleh negara dapat dibaca sebagai sebuah bentuk perlawanan masyarakat lokal terhadap klaim kedaulatan negara atas perbatasan. Dalam kebijakan tata kelola perbatasan yang terintegrasi, pendekatan budaya harus menjadi salah satu komponen utama yang mewarnai pendekatan lain. Jailly menempatkan empat dimensi kebijakan secara sejajar, pendekatan budaya dalam kebijakan tata kelola perbatasan menjadi prinsip yang menjiwai kebijakan keamanan, politik lokal dan kebijakan ekonomi dalam tata kelola perbatasan. Konsekuensi praktis dari kajian ini adalah kebijakan bahwa tata kelola perbatasan harus keluar dari dominasi pendekatan keamanan ekonomi ke pendekatan terintegrasi. Kajian ini mengusulkan konsep ruang sosial kultural lintas batas (Trans-border social and cultural space) sebagai elemen penting dalam tata kelola perbatasan yang terintegrasi.*

***Kata kunci:*** Tata kelola perbatasan, Indonesia-Timor Leste, Pelintas batas budaya.

## ABSTRACT

### THE GOVERNMENT STRATEGY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA IN THE HANDLING OF THE PROBLEM OF CROSSER BORDER INDONESIA-TIMOR LESTE

Remigius Seran

*One of the borders that has a complicated governance issue is the border between Indonesia and Timor-Leste. The urgency to set up the Border Between Indonesia and Timor-Leste and the border crossers is based on much more complex historical reasons than the arrangement of Indonesia's borders with other countries. border governance policies between Indonesia and Timor-Leste are characterized by: border governance policies indicate a desire to adopt an integrated approach, governance practices tend to be fragmented where two very dominant approaches are the security approach and the socio-economic welfare approach. A border governance policy that ignores cultural identity variables leads to a reverse response, namely the use of cultural identity to challenge the country's dominant conception and policy in border governance. The phenomenon of "rat road" and other cross-border interaction networks called illegal by the state can be read as a form of local community resistance to the claim of state sovereignty over the border. In an integrated border governance policy, a cultural approach should be one of the main components that characterize other approaches. Jailly puts the four dimensions of the policy parallel, the cultural approach in border governance policy to the principles that fuel security policy, local politics and economic policy in border governance. The practical consequence of this study is the policy that border governance must move beyond the dominance of the economic security approach to an integrated approach. This study proposes the concept of trans-border social and cultural space as an important element in integrated border governance.*

**Key Words:** *Border governance, Indonesia – Timor-Leste, Cultural crosser borders.*